

Penerapan Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Novita Roni Sahi¹, Jusrin Kadir², Yahya Antu³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: novisahi49@gmail.com¹, kadirjus04@gmail.com², yahyaantu03@gmail.com³

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kepemimpinan partisipatif oleh Kepala Desa Hutadaa dalam proses pengambilan keputusan, dengan memfokuskan pada tiga aspek utama yaitu sikap dan kesadaran, komunikasi, serta keterampilan partisipatif masyarakat. Partisipasi masyarakat desa merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun budaya musyawarah mufakat telah mengakar kuat, partisipasi warga belum sepenuhnya aktif karena masih rendahnya keterampilan memahami substansi musyawarah, kurangnya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat, serta komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka. Kepala desa telah berupaya menerapkan pola kepemimpinan yang inklusif, namun masih diperlukan penguatan melalui strategi edukatif dan peningkatan kapasitas warga. Kesimpulannya, keberhasilan kepemimpinan partisipatif sangat bergantung pada kombinasi tiga aspek: sikap kolektif, komunikasi dua arah yang efektif, serta keterampilan warga dalam mengekspresikan aspirasi dan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan desa.

Keywords: kepemimpinan partisipatif, pengambilan keputusan, komunikasi desa, partisipasi masyarakat, keterampilan warga.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa, sebagai unit pemerintahan paling dasar dalam sistem administrasi negara, memegang posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kedekatan struktur desa dengan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil di level ini memiliki dampak langsung terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kepala desa, dalam konteks ini, tidak semata-mata berperan sebagai administrator wilayah, melainkan sebagai aktor strategis yang menentukan arah pembangunan serta penjaga ruang deliberatif antara negara dan warga. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan kepala desa sangat menentukan berhasil atau tidaknya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan partisipatif (Ahmad et al., 2022; Waseel et al., 2024).

Dalam paradigma pemerintahan modern dan demokratis, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan prinsip substantif yang melekat pada konsep good governance. Model kepemimpinan partisipatif muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut, karena menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin dan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (Karatepe et al., 2021; Saputra et al., 2023). Melalui kepemimpinan partisipatif, legitimasi kebijakan dapat diperkuat, rasa memiliki

masyarakat terhadap keputusan publik meningkat, dan kualitas implementasi kebijakan menjadi lebih adaptif terhadap konteks lokal (Djafar et al., 2022; Kadir, 2020).

Secara normatif, komitmen terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa telah memiliki pijakan hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki otonomi untuk mengelola sumber dayanya sendiri, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Namun demikian, ketimpangan antara norma dan praktik masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan prinsip partisipatif di tingkat desa.

Fenomena tersebut terlihat nyata dalam konteks Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Meskipun desa ini menunjukkan itikad baik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, observasi awal menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam forum-forum musyawarah desa. Rendahnya partisipasi ini tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek krusial yang saling berkaitan: pertama, lemahnya sikap dan kesadaran kepala desa serta perangkat dalam menginternalisasi pentingnya pelibatan warga secara aktif; kedua, belum optimalnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat; dan ketiga, terbatasnya keterampilan teknis maupun sosial, baik di pihak pemerintah desa maupun masyarakat, untuk menciptakan dialog kebijakan yang berkualitas dan bermakna.

Lebih jauh, ditemukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa cenderung bersifat satu arah, formal, dan elitis. Informasi mengenai agenda pembangunan seringkali disampaikan dalam bahasa teknis tanpa ada mekanisme klarifikasi atau ruang diskusi terbuka. Masyarakat awam yang memiliki keterbatasan pendidikan dan literasi kebijakan merasa enggan, bahkan tidak layak, untuk menyampaikan pendapatnya. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya budaya paternalistik yang masih membayangi relasi antara warga dan pemimpin desa (Northouse, 2025; Hasan, 2023). Di sisi lain, saluran komunikasi yang terbatas seperti kurangnya papan informasi, minimnya pemanfaatan media digital, serta absennya forum interaktif memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat (W. A. Pakaya et al., 2023; Nusi et al., 2023).

Dari sisi keterampilan, baik aparat desa maupun warga menunjukkan keterbatasan dalam memahami mekanisme pengambilan keputusan dan isu-isu teknis dalam pembangunan desa. Masyarakat, meskipun hadir dalam musyawarah, cenderung menjadi pendengar pasif. Hal ini bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman teknis yang memadai. Rendahnya kapasitas komunikasi, argumentasi, serta literasi kebijakan publik menjadi hambatan substantif terhadap partisipasi yang bermakna (Martínez-Córcoles et al., 2023; Dartey-Baah et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan partisipatif diyakini mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat (Pakaya et al., 2024; Hasan et al., 2025). Namun, penerapan model ini tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara kesadaran kolektif, sistem komunikasi yang inklusif, dan penguatan keterampilan warga untuk memahami serta merespons isu-isu publik secara kritis. Kepala desa dituntut untuk menjadi fasilitator dialog, bukan sekadar penyampai informasi (Hao & Yazdanifard, 2015). Ia perlu mengembangkan pola komunikasi yang edukatif, membuka ruang interaksi antarwarga, serta mengintegrasikan pendekatan kultural dan digital dalam menyampaikan kebijakan.

Namun, tinjauan pustaka dan studi sebelumnya tentang kepemimpinan desa di Indonesia masih banyak berfokus pada aspek birokrasi, pembangunan fisik, dan peran formal kepala desa, tanpa secara mendalam mengeksplorasi dinamika kepemimpinan partisipatif dalam konteks lokal spesifik. Di sinilah letak gap riset yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini: belum adanya studi yang secara komprehensif menggali bagaimana kepemimpinan partisipatif kepala desa dijalankan dalam pengambilan

keputusan di Desa Hutadaa, dengan pendekatan yang menyoroti relasi antaraktor, sistem komunikasi, serta kapasitas warga secara simultan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana penerapan gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa dalam pengambilan keputusan di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Fokus ini menjadi penting sebagai upaya untuk memperkaya model kepemimpinan desa yang lebih demokratis, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan warga. Penelitian ini tidak hanya ingin mengungkap kelemahan yang ada, tetapi juga menawarkan refleksi kritis dan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan di desa-desa Indonesia lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, yang bertujuan untuk dapat memahami objek penelitian secara alamiah dan peneliti menjadi instrumen kunci, hal ini berdasarkan pandangan Sugiyono (2017) bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti suatu obyek secara alamiah, di mana peneliti menjadi saran utama dalam penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian berorientasi pada penekanan makna dibanding melakukan generalisasi.

Pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mendeskripsikan (menjelaskan) obyek penelitian secara apa adanya. Sebagaimana dimaksudkan oleh (Arikunto, 2016) melalui penelitian deskriptif, peneliti memiliki maksud untuk memberikan gambaran atau menerangkan suatu gejala.

Stat of the Art

Dalam mendukung kajian ini, beberapa hasil penelitian terdahulu menjadi titik tolak yang penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan warga desa dalam proses pemerintahan, serta peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam menciptakan ruang partisipatif yang inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahman, (2021) berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bone” menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih cenderung rendah, khususnya pada tahap awal perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat umumnya hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, sementara pada fase perencanaan awal, keterlibatan mereka minim. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat bukan semata disebabkan oleh keengganan warga, melainkan juga karena terbatasnya akses informasi serta kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam melibatkan warga secara aktif sejak awal proses perencanaan.

Selanjutnya, penelitian oleh (Siti Marlina, 2020) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah Desa” memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat partisipasi warga. Dalam penelitiannya, Marlina menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap sejauh mana mereka memahami dan terlibat dalam forum musyawarah. Selain itu, kualitas komunikasi pemerintah desa dalam menyampaikan agenda dan urgensi musyawarah juga menjadi faktor kunci (Nurhaliza & Marlina, 2024). Tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat memahami fungsi dan peran musyawarah desa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemahaman yang terbatas mengenai hak dan kewajiban sebagai warga desa menjadi salah satu penghambat partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dedi Kurniawan, 2019) melalui penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Warga di Kecamatan Limboto” menyoroti pentingnya keterlibatan proaktif dari pihak pemerintah desa dalam membuka ruang partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dan perangkatnya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap

meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa yang responsif, transparan, dan memberikan ruang dialog yang inklusif dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendorong warga untuk berperan serta secara aktif dalam pengambilan keputusan.

Ketiga penelitian tersebut secara umum menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa tidak akan berjalan optimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari pemimpin desa sebagai fasilitator dialog dan pembuka ruang partisipatif. Selain itu, tingkat pendidikan, kualitas komunikasi, serta pemahaman terhadap proses pemerintahan desa merupakan elemen penting yang saling terkait. Oleh karena itu, kajian ini menempatkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut sebagai landasan konseptual dan empiris dalam menjelaskan pentingnya penerapan gaya kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

Konsep Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan pemberdayaan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam paradigma ini, pemimpin tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya pusat otoritas, melainkan sebagai fasilitator yang mengajak anggota tim untuk turut serta berkontribusi terhadap arah organisasi. Gaya ini menumbuhkan kepercayaan tim terhadap pemimpin karena adanya transparansi dan komunikasi dua arah yang konsisten. Liu et al., (2025), Mengemukakan pemimpin partisipatif secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berdiskusi dan berbagi gagasan, yang pada akhirnya meningkatkan keterikatan dan loyalitas karyawan.

Karakteristik utama dari kepemimpinan partisipatif adalah penghargaan terhadap suara individu dalam organisasi. Pendekatan ini memungkinkan anggota tim dari berbagai jenjang untuk menyuarakan ide, kritik, maupun saran yang konstruktif. Keterlibatan semacam ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil keputusan, tetapi juga memperkaya proses pengambilan kebijakan melalui perspektif yang beragam. Karatepe et al., (2021) menegaskan bahwa partisipasi aktif karyawan dalam keputusan organisasi berkorelasi positif dengan peningkatan motivasi kerja dan kepuasan terhadap peran mereka dalam tim.

Kepemimpinan partisipatif juga berdampak pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan mendorong inisiatif dan tanggung jawab individu, pemimpin menciptakan iklim kerja yang adaptif dan inovatif. Tim yang merasa dihargai cenderung lebih berani mengemukakan solusi kreatif dan memiliki ketahanan kerja yang tinggi, terutama saat menghadapi tantangan kompleks. Ini sangat penting dalam dunia kerja yang dinamis, di mana solusi tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi dibentuk melalui interaksi dan konsensus. Gaya kepemimpinan ini dinilai sangat efektif dalam konteks kerja generasi milenial dan Gen Z yang menghargai nilai inklusivitas dan keadilan sosial (Ahmad et al., 2022).

Namun, implementasi kepemimpinan partisipatif tidak terlepas dari tantangan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dapat memperlambat proses, terutama jika tidak ada mekanisme yang efisien untuk menyaring masukan. Oleh karena itu, pemimpin partisipatif harus memiliki keterampilan manajemen konflik dan kemampuan untuk menyeimbangkan partisipasi dengan efektivitas waktu. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kepekaan terhadap dinamika kelompok agar tidak terjadi dominasi oleh individu tertentu dalam forum diskusi (Sok & O'Cass, 2011). Meskipun demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan komunikasi yang terstruktur dan fasilitasi yang adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil temuan penelitian lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Hutadaa. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi data lapangan yang diperoleh dengan teori kepemimpinan partisipatif dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana praktik kepemimpinan partisipatif yang dijalankan oleh kepala desa berdampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. Tiga fokus

utama dalam pembahasan ini meliputi aspek Sikap dan Kesadaran, efektivitas sosialisasi, serta Pengaruh Keterampilan dalam mengefektifkan Nilai sosial dan budaya atau kultural terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui pembahasan ini, diharapkan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika dan tantangan dalam mewujudkan kepemimpinan desa yang partisipatif dan inklusif.

Sikap dan Kesadaran

Sikap dan Kesadaran partisipatif masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang inklusif di tingkat desa. Di Desa Hutadaa, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Sebagai contoh, narasumber W.H menyatakan bahwa masyarakat adalah subjek dari pelayanan desa dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan sangat penting. Hal ini sejalan dengan temuan Cholif Fajrilla, (2021) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam musyawarah desa karena mereka berperan sebagai subjek pembangunan (Iloponu et al., 2024).

Namun, tidak semua warga memiliki tingkat Sikap dan Kesadaran yang sama. Sebagian warga masih beranggapan bahwa urusan keputusan desa adalah tanggung jawab pemerintah semata (Kadir, 2020). Narasumber O.I.N mengamati bahwa ada warga yang memiliki Sikap dan Kesadaran tinggi terhadap pentingnya musyawarah desa, namun ada pula yang masih beranggapan bahwa urusan keputusan desa adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah (Paniagih et al., 2021). Penelitian oleh Kayupa et al (2025) juga mencatat bahwa banyak masyarakat merasa sebagai "objek pembangunan" ketimbang "subjek pembangunan," yang mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif (Djafar et al., 2022).

Keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, dan adat dalam musyawarah desa menjadi strategi untuk meningkatkan Sikap dan Kesadaran partisipatif. Narasumber N.A.Y menyatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa, pihak pemerintah desa selalu berupaya melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif yang juga disarankan oleh Paniagih et al (2021), yang menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kendati demikian, masih terdapat kendala dalam meningkatkan Sikap dan Kesadaran partisipatif. Narasumber F.K menyebutkan bahwa biasanya warga hanya tahu ada musyawarah setelah mendapat undangan, namun belum semua warga memahami bahwa mereka sebenarnya punya hak untuk menyampaikan pendapat dalam forum tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan Sikap dan Kesadaran masyarakat. Penelitian oleh Paniagih et al (2021) menyoroti bahwa Komunikasimelalui media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode tradisional.

Peran kepala desa juga krusial dalam mendorong Sikap dan Kesadaran partisipatif. Narasumber H.A menyatakan bahwa kepala desa sering mengajak warga datang di balai desa untuk rapat, namun tidak semua warga langsung datang. Penelitian oleh Kayupa et al (2025) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan gaya kepemimpinan partisipatif mendorong keterlibatan warga yang lebih besar.

Secara keseluruhan, peningkatan Sikap dan Kesadaran partisipatif masyarakat di Desa Hutadaa memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan komunikasi yang efektif, keterlibatan tokoh masyarakat, dan kepemimpinan yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan dalam literatur yang menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Komunikasi

Komunikasi kebijakan desa merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Desa Hutadaa, narasumber W.H menyatakan bahwa Komunikasi kebijakan desa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh BPD, dan melibatkan perwakilan

dari berbagai kelompok masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam penyebaran informasi kebijakan.

Namun, efektivitas Komunikasimasih menghadapi tantangan. Narasumber F.K mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa tidak selalu dipahami secara utuh oleh masyarakat, karena penyampaian seringkali bersifat sepihak dan tidak diikuti dengan penjelasan lanjutan. Penelitian oleh Paniagih et al (2021) juga mencatat bahwa komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia.

Metode penyampaian informasi juga mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Narasumber O.L menyatakan bahwa metode penyampaian informasi tentang musyawarah yang selama ini dilakukan umumnya melalui undangan dan pesan lisan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi. Penelitian oleh Cholif Fajrilla (2021) menunjukkan bahwa Komunikasimenggunakan media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode tradisional.

Keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam Komunikasijuga penting. Narasumber W.H menyatakan bahwa pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti karang taruna, agar penyampaian informasi tidak hanya berhenti di forum musyawarah, tetapi menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Hal ini sejalan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan desa (Kayupa et al., 2025).

Waktu dan cara penyampaian informasi juga perlu diperhatikan. Narasumber F.A menyatakan bahwa kadang diumumkan di satu tempat, warga di tempat lain tidak tahu, atau sudah diberitahu, tapi waktunya mendadak, jadi orang-orang tidak sempat datang. Penelitian oleh Kayupa et al (2025) menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam Komunikasiuntuk memastikan partisipasi masyarakat yang optimal.

Oleh Karena itu, Komunikasikebijakan dan informasi di Desa Hutadaa perlu ditingkatkan melalui penggunaan berbagai media komunikasi, keterlibatan lembaga desa, dan perencanaan yang matang. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan desa.

Keterampilan

Keterampilan partisipatif merupakan aspek fundamental yang sangat memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Di Desa Hutadaa, salah satu kekuatan sosial yang selama ini menopang keterlibatan warga adalah praktik musyawarah mufakat yang telah mengakar dalam keseharian warga. Narasumber W.H menyatakan bahwa desa mereka masih sangat menjunjung tinggi budaya musyawarah mufakat, dan itu menjadi kekuatan sosial yang mendorong keterlibatan kolektif warga dalam setiap proses kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan warga dalam merespons ruang partisipasi tidak semata-mata dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari kemampuan mereka menyerap nilai-nilai sosial dan menempatkan diri sebagai bagian dari proses bersama.

Namun demikian, tantangan tetap muncul terutama dalam aspek keterampilan warga dalam memahami substansi forum musyawarah. Narasumber F.K mengamati bahwa sebagian warga tampak kebingungan ketika mengikuti musyawarah karena mereka kurang memahami istilah atau konsep yang dibicarakan. Mereka cenderung diam karena tidak percaya diri untuk bertanya atau mengonfirmasi informasi yang mereka belum pahami. Fenomena ini memperkuat temuan Paniagih et al (2021), yang menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi warga sering kali bersumber dari keterbatasan kemampuan dalam memahami alur perencanaan pembangunan, bukan karena ketidakpedulian. Dengan kata lain, warga menghadapi hambatan keterampilan konseptual yang berujung pada keengganan untuk berpartisipasi aktif.

Dalam konteks ini, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan sebagai agen keterampilan sosial yang sangat penting. Narasumber O.I.N menekankan bahwa mereka kerap menjadi penerjemah informal atas informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga yang kurang memahami konteks, terutama bagi warga lansia atau

yang berlatar belakang pendidikan rendah. Peran ini sangat strategis karena mereka mampu menjembatani ketimpangan pemahaman dengan menggunakan pendekatan yang lebih kultural dan personal. Hal ini sejalan dengan argumen dalam studi Paniagih et al (2021) bahwa peningkatan kapasitas warga di desa sangat efektif bila dilakukan melalui pendekatan informal yang didasarkan pada struktur sosial yang sudah dikenal dan dipercaya warga.

Tidak kalah penting, pemilihan bahasa dalam proses musyawarah juga menjadi kunci dalam membentuk keterampilan partisipatif warga. Narasumber H.A menyatakan bahwa banyak istilah teknis dalam forum desa yang sulit dimengerti oleh warga biasa, sehingga kepala desa dan perangkatnya perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan membaur. Penelitian yang dilakukan oleh Cholif Fajrilla (2021) juga menegaskan pentingnya penggunaan bahasa yang akrab dengan warga desa, agar partisipasi yang muncul bukan hanya bersifat simbolik, melainkan partisipasi yang sadar dan memahami substansi kebijakan yang dibicarakan.

Peran kepala desa dalam hal ini sangat menentukan. Narasumber F.A menyebut bahwa kepala desa Hutadaa sudah cukup terbuka dalam menyampaikan program pembangunan melalui forum musyawarah. Namun, ia juga mencatat bahwa penjelasan sering kali menggunakan istilah yang tidak semua warga pahami. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan penyampaian informasi perlu menjadi bagian dari kompetensi pemimpin desa. Penelitian oleh Kayupa et al (2025) mendukung hal ini, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang partisipatif berpengaruh langsung terhadap tingkat keterlibatan masyarakat. Seorang pemimpin yang memiliki keterampilan komunikatif, empatik, dan adaptif terhadap kapasitas warga akan lebih berhasil dalam mendorong partisipasi yang sejati.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dalam konteks partisipasi desa tidak terbatas pada kemampuan membaca atau memahami teks, melainkan mencakup kemampuan sosial, emosional, dan konseptual warga dalam menanggapi nilai-nilai musyawarah dan demokrasi lokal. Keterampilan ini dapat diperkuat melalui pendekatan edukatif yang kontekstual, melibatkan tokoh informal sebagai fasilitator, penggunaan bahasa yang ramah warga, serta gaya kepemimpinan yang adaptif terhadap kapasitas masyarakat. Kepala desa yang menyadari pentingnya keterampilan partisipatif sebagai bagian dari proses pembangunan akan lebih mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, kritis, dan bermakna.

KESIMPULAN

Kepemimpinan partisipatif di Desa Hutadaa telah berupaya membangun Sikap dan Kesadaran masyarakat dan aparat desa mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa secara aktif mendorong kehadiran dan peran serta masyarakat melalui musyawarah dan forum-forum desa. Meskipun demikian, Sikap dan Kesadaran ini belum merata di seluruh kalangan masyarakat. Masih terdapat warga yang memandang pengambilan keputusan sebagai ranah pemerintah semata, sehingga mereka cenderung pasif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Sikap dan Kesadaran partisipatif perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang lebih menyentuh komunitas secara langsung.

Komunikasi kebijakan dan program desa di Desa Hutadaa telah dilakukan melalui forum-forum musyawarah dan dibantu oleh lembaga-lembaga seperti BPD dan karang taruna. Namun, efektivitas Komunikasi masih mengalami kendala, terutama dalam hal metode penyampaian informasi, akses komunikasi yang belum merata, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Komunikasisingkali tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode Komunikasiyang lebih beragam, adaptif terhadap kondisi warga, serta mampu membangun komunikasi dua arah.

Keterampilan partisipatif masih menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan di Desa Hutadaa, meskipun budaya musyawarah mufakat tetap menjadi nilai sosial yang kuat dan hidup di tengah masyarakat. Nilai ini secara kultural telah membuka

ruang bagi warga untuk terlibat, namun keterampilan warga dalam memahami substansi forum, menanggapi pembahasan, serta menyampaikan pendapat secara terbuka masih terbatas. Banyak warga yang hadir dalam musyawarah, tetapi belum memahami isi yang dibahas, dan enggan bertanya karena merasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan partisipatif perlu menjadi agenda prioritas, melalui program edukasi berkelanjutan, penyederhanaan bahasa dalam forum desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai jembatan penguat pemahaman warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga berlangsung secara substansial dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. K., Abdulhamid, A. B., Wahab, S. A., & Nazir, M. U. (2022). Impact of the project manager's transformational leadership, influenced by mediation of self-leadership and moderation of empowerment, on project success. *International Journal of Managing Projects in Business*, 15(5), 842–864.
- Andi Rahman. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Bone*” Skripsi. Universitas Bina Taruna Gorontalo.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Cholif Fajrilla. (2021). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Melalui Sosialisasi Media Sosial. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5, 1–23.
- Dartey-Baah, K., Quartey, S. H., & Adotey, A. (2021). Examining transformational and transactional leadership styles and safety citizenship behaviors in the power distribution sector: evidence from Ghana. *International Journal of Energy Sector Management*, 15(1), 173–194.
- Dedi Kurniawan. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Warga di Kecamatan Limboto*, Skripsi. Universitas Bina Taruna Gorontalo.
- Djafar, M. S., Katili, A. Y., & Kadir, J. (2022). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV (DIKLATPIM IV). *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 1(2), 70–77.
- Hao, M. J., & Yazdanifard, R. (2015). How effective leadership can facilitate change in organizations through improvement and innovation. *Global Journal of Management and Business Research*, 15(9), 1–6.
- Hasan, K. (2023). The Influence of Transformational Leadership and Work Motivation on Employee Performance: Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(1), 39–48.
- Hasan, K., Mokodongan, R., & Djaba, M. (2025). Integrasi Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja dalam Praktik Manajemen Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 31–43.
- Iloponu, R., Kadir, J., & Antu, Y. (2024). Eksistensi Organisasi Karang Taruna Tomini Raya Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 541–544.
- Kadir, J. (2020). Faktor-faktor Penghambat Proses Surat Keluar di Kantor Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo. *Publik*, 2(2), 148–157.
- Karatepe, O. M., Beirami, E., Bouzari, M., & Safavi, H. P. (2021). *Corrigendum to “Does work engagement mediate the effects of challenge stressors on job outcomes? Evidence from the hotel industry”*[*Int. J. Hosp. Manag.* 36 (2014) 14–22, <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.08.003>].
- Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia (Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia). *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO)*, 6(1), 187–199.

- Liu, J., Liu, X., & Gao, H. (2025). Moderated Mediation Analysis of the Relationship Between Inclusive Leadership and Innovation Behavior. *Sustainability*, 17(9), 3962.
- Martínez-Córcoles, M., Penarroja, V., & Stephanou, K. (2023). Angels, demons and empowering leadership: simultaneous compensatory links to work role performance. *Baltic Journal of Management*, 18(1), 54–69.
- Northouse, P. G. (2025). *Leadership: Theory and practice*. Sage publications.
- Nurhaliza, S., & Marlina, L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 9157–9169.
- Nusi, R. S. A., Rachman, E., & Antu, Y. (2023). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Penataan Pasar Rakyat Duingingi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8194–8202.
- Pakaya, N. A., Pariono, A., & Hasan, K. K. (2024). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14110–14116.
- Pakaya, W. A., Rachman, E., & Antu, Y. (2023). MANAJEMEN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA TOLANGO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA. *Jurnal Administrasi Negara Dan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 142–153.
- Paniagih, T., Dedi, A., & Garis, R. R. (2021). *Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar*.
- Saputra, D., Parashakti, R. D., & Perkasa, D. H. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Budaya Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Lapangan. *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP*, 1(01), 1–14.
- Siti Marlina. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah Desa, Skripsi*. Universitas Bina Taruna Gorontalo.
- Sok, P., & O'Cass, A. (2011). Achieving superior innovation-based performance outcomes in SMEs through innovation resource–capability complementarity. *Industrial Marketing Management*, 40(8), 1285–1293.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)). Alfabeta.
- Waseel, A. H., Zhang, J., Zia, U., Mohsin, M. M., & Hussain, S. (2024). Leadership, knowledge dynamics and dual-path innovation: unravelling the synergy in Pakistan's manufacturing sector. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 39(10), 2104–2122.